

**PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
ANTARA HUKUM ADAT MADURA
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMER 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa timur



Oleh :
ADRIANSYAH
NPM. 0771010144

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN
PERUMAHAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Disini peneliti mengambil judul : "PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA HUKUM ADAT MADURA DENGAN UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN".

Penyusunan Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam penyusunan Skripsi.

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadep I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Selaku Dosen Pembimbing Utama
3. Bapak Drs. EC Gendut Soekarno, MS selaku Wadep II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
4. Bapak Panggung Handoko S.H., M.M Selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ustadz Abdul Rosid Abidin, selaku Sesepuh Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diwawancarai
6. Bapak Fadli, Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diwawancarai
7. Bapak Sayeki Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk diwawancarai
8. Ustadz Rifai, Selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Bangkalan yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk diwawancarai
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Staff Tata Usaha beserta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
11. Kedua orang tua tercinta, dan seluruh saudara-saudara yang telah memberikan dukungan moral maupun material serta doa dan restunya selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan Rakhmad, Zendy, Abu, Febrina, Kadek, Jai dan seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun peneliti harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGHANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 PERUMUSAN MASALAH.....	4
1.3 TUJUAN PENELITIAN	4
1.4 MANFAAT PENELITIAN	5
1.5 KAJIAN PUSTAKA	5
1.5.1 Pengertian Perkawinan.....	5
1.5.1.1 Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	6
1.5.1.2 Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	7
1.5.1.3 Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	13
1.5.1.4 Perkawinan Menurut Hukum Perdata.....	14

1.5.2 Perkawinan Dibawah Umur	14
1.5.2.1 Perkawinan Dibawah Umur menurut Konsep Hukum Perdata.....	14
1.5.2.2 Perkawinan Dibawah Umur menurut Konsep Hukum Adat.....	16
1.5.2.3 Perkawinan Dibawah Umur menurut Konsep Undang -Undang R.I sekarang	17
1.5.3 Hukum Adat	17
1.5.4 Adat Madura.....	19
1.5.5 Anak Dibawah Umur	22
1.5.6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.....	22
1.6 METODE PENELITIAN.....	24
1.6.1 Pendekatan Masalah	25
1.6.2 Sumber Data	26
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	27
1.6.4 Metode Analisis Data.....	28
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	29
 BAB II PELAKSANAAN PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT MADURA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
2.1 Pelaksanaan Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	31
2.2 Pelaksanaan Hukum Adat Madura Dalam Perkawinan Dibawah Umur di Madura.....	40

2.3 Perbandingan Antara Pelaksanaan perkawinan Dibawah Umur Dalam Hukum Adat Madura dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.....	47
 BAB III AKIBAT HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
3.1 Akibat Hukum Perkawinan Menurut Hukum Adat Madura	52
3.2 Akibat Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	53
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Adriansyah
NPM : 0771010144
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 15 Juli 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN DIBAWAH UMUR ANTARA
HUKUM ADAT MADURA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

ABSTRAKSI

Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lain salah satunya dengan perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hukum yang mengatur perkawinan ialah Hukum agama dan hukum adat.

Tujuan penulisan adalah merumuskan pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut hukum adat Madura dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan akibat hukum perkawinan dibawah umur menurut hukum adat Madura dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikaji melalui metode pendekatan yuridis empiris.

Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Sedangkan secara hukum adat batas usia untuk melakukan suatu perkawinan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga perlu adanya suatu cara pelaksanaan perkawinan yang sesuai menurut hukum adat serta menurut ketentuan perundang-undangan.

Setiap perkawinan yang dilakukan dimana salah satu atau keduanya masih berusia dibawah umur berdasarkan ketentuan Undang-Undang dapat menimbulkan suatu dampak bagi kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Sehingga perlu adanya suatu ketentuan batas usia dalam melakukan perkawinan agar setiap pasangan yang akan melakukan perkawinan memiliki kematangan dalam berfikir dan kematangan jiwa dalam menghadapi masalah rumah tangga, sehingga tidak terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Bahwa perkawinan dibawah umur masih terjadi jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi jika berdasarkan hukum adat perkawinan tersebut tidak dianggap perkawinan dibawah umur dan hal itu sah menurut adat Madura.

Kata Kunci : Hukum Adat, Pelaksanaan Perkawinan, Akibat Hukum